



KABUPATEN REMBANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) TAHUN 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Pemuda Km.02 Telp./Fax.(0295) 692311

KATA PENGANTAR

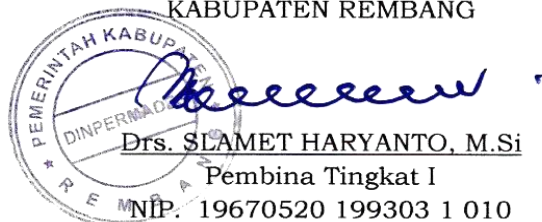
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Dinas Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes,

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 050/27/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan Rencana Strategis 2016-2021 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REMBANG



Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670520 199303 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi	2
1.3.1 Susunan Organisasi Perangkat daerah.....	3
1.3.2 Kondisi Pegawai.....	4
1.3.3 Data Sarana dan Prasarana	5
1.4 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	8
1.5 Landasan Hukum.....	14
1.6 Sistematika	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Rencana Strategis	25
2.1.1 Visi	25
2.1.2 Misi.....	26
2.1.3 Tujuan.....	27
2.1.4 sasaran	27
2.1.5 Strategi.....	27
2.1.6 Kebijakan.....	28
2.2 Perencanaan Kinerja.....	30

2.3	Perjanjian Kinerja.....	32
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	39
3.1	Capaian Kinerja Organisasi.....	39
3.2	Analisis Capaian Kinerja.....	49
3.3	Realisasi Anggaran.....	60
BAB IV	PENUTUP	63
4.1	Kesimpulan.....	63
4.2	Rekomendasi	63

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Jumlah pegawai Dinpermades Kab. Rembang	5
Tabel I. 2 Jumlah sarana dan prasarana Dinpermades Kab. Rembang	6
Tabel I. 3 Indeks Desa Membangun Kab. Rembang Tahun 2016-2021	12
Tabel I. 4 Rekap Status Perkembangan Kemandirian Desa Tahun 2021	12
Tabel I. 5 Perbandingan Status Perkembangan Kemandirian Desa Tahun 2020 dan 2021	14
Tabel II. 1 Indikator Kinerja Utama Dinpermades Tahun 2021	19
Tabel II. 2 Indikator Kinerja Sasaran Dinpermades Tahun 2021	20
Tabel II. 3 Program dan Kegiatan Dinpermades Tahun 2021	20
Tabel II. 4 Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Dinpermades Tahun 2021	29
Tabel II. 5 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinpermades Tahun 2021	30
Tabel II. 6 Rencana Kinerja Dinpermades Tahun 2021.....	31
Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja Dinpermades Tahun 2021	33
Tabel II. 8 Target Kinerja Program dan Kegiatan Dinpermades Tahun 2021	33
Tabel III. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	39
Tabel III. 2 Capaian Kinerja Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2021	40
Tabel III. 3 Data Kawasan Perdesaan yang Terbentuk Tahun 2021	43
Tabel III. 4 Rekapitulasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2017 - 2021	46
Tabel III. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinpermades Berdasarkan Program dan Kegiatan	47
Tabel III. 6 Target dan Realisasi Kinerja Dinpermades Tahun 2021	50
Tabel III. 7 Target dan Realisasi Kinerja Dinpermades Kab. Rembang Tahun 2021 dan Beberapa Tahun Terakhir.....	51
Tabel III. 8 Realisasi Capaian Kinerja Dinpermades Kab. Rembang Tahun 2021	53
Tabel III. 9 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Dinpermades Tahun 2021	54
Tabel III. 10 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
Tabel III. 11 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja Dinpermades Tahun 2021	57
Tabel III. 12 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinpermades Tahun 2021	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinpermades Kabupaten Rembang 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang disusun dalam rangka pelaksanaan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam perspektif yang luas Laporan Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2021 ini secara garis besar berisi tentang informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2021.

Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja merupakan kinerja yang akan dicapai selama Tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama Tahun 2021 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2021 ini merupakan laporan pelaksanaan kinerja tahun kelima dari rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang periode Tahun 2016-2021.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2021 adalah untuk

memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu dari pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang selama Tahun Anggaran 2021;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2021;
3. Hasil evaluasi berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinpermades Kabupaten Rembang dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah

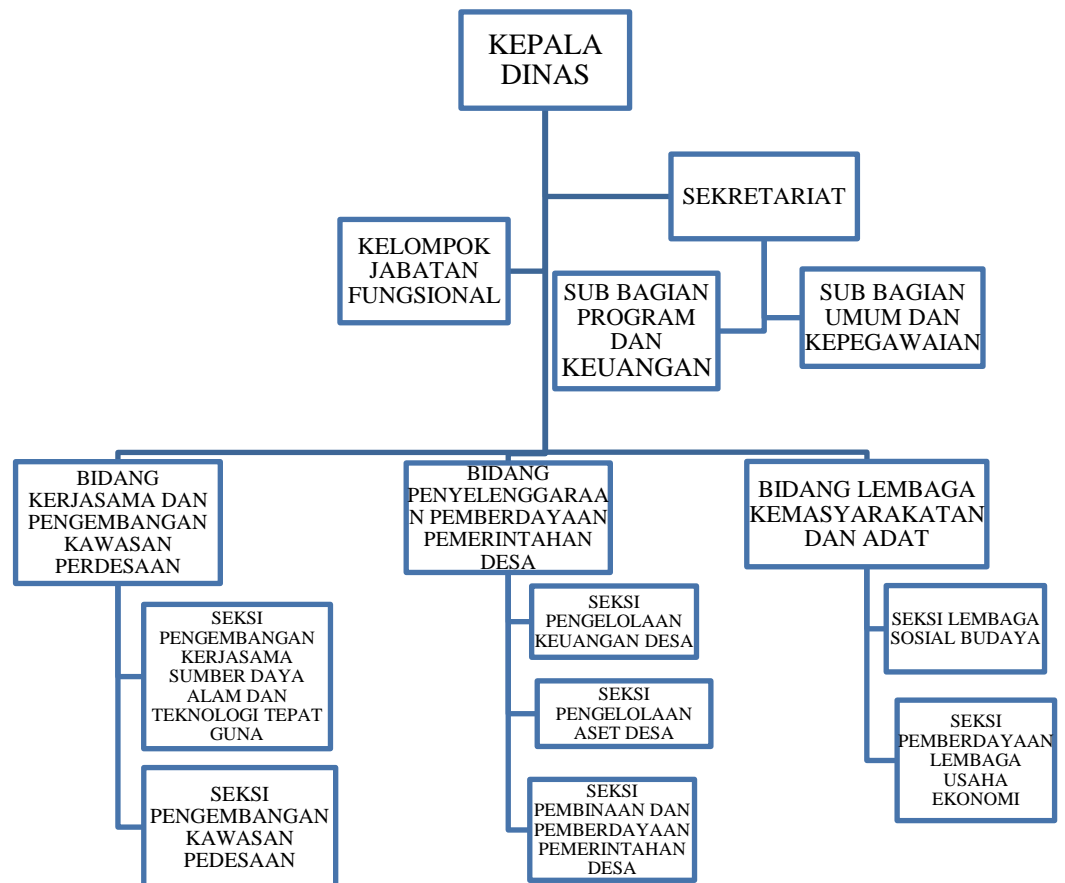
Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan terdiri dari :
 - Seksi Pengembangan Kerjasama Sumber daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
 - Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan
4. Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - Seksi Pengelolaan Keuangan Desa
 - Seksi Pengelolaan Aset Desa
 - Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa
5. Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Adat terdiri dari :

- Seksi Lembaga Sosial Budaya
- Seksi Pemberdayaan lembaga Usaha Ekonomi

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinpermades dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:



Gambar I. 1 *Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinpermades Kabupaten Rembang*

1.3.2 Kondisi Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan dan berkompentensi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang didukung oleh 60 pegawai yang terdiri atas

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 33 orang dan Tenaga Kontrak 1 orang dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 26 orang. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 33 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I. 1 Jumlah pegawai Dinpermades Kab. Rembang

NO	URAIAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG	PENDIDIKAN									JML
		SD	SMP	SMA	D2	D3	D4	S1	S2	S3	
1	Juru Muda (I/a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (I/c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tningkat I (I/d)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Pengatur Muda (II/a)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Pengatur (II/c)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5
3	Penata Muda (III/a)	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-	-	3	-	-	-	1	-	-	4
	Penata (III/c)	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
	Penata Tingkat I (III/d)	-	-	-	-	-	-	4	1	-	5
4	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	-	1	2	3	-	6
	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1	2	10	0	0	1	12	7	0	33

Sumber Data : Dinpermades 2021

1.3.3 Data Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang guna menunjang penyelenggaraan pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

Tabel I. 2 Jumlah sarana dan prasarana Dinpermades Kab. Rembang

No.	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah Bangunan kantor Pemerintah	1	Bidang	
2	Gedung	10	Gedung	- Gedung permanen : 7 - Gudang tertutup : 2 - Gedung pertemuan : 1
3	Alat Besar	1	Buah	Portable Generating Set
4	Alat angkutan Darat Bermotor	18	Buah	- Station Wagon : 5 - Kendaraan dinas bermotor perorangan : 1 - Sepeda Motor : 13
5	Alat Kantor	21	Buah	- Alat penyimpan perlengkapan kantor : 19 - Alat kantor lainnya: 2
6	Alat Rumah tangga	440	Buah	- Meubelair : 393 - Alat pembersih : 2 - Alat Pendingin : 24 - Alat rumah tangga lainnya (Home Use):21
7	Alat Pemadam kebakaran	1	Buah	
8	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	14	Buah	
9	Lemari arsip	4	Buah	

No.	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
10	Alat Studio	29	Buah	- Peralatan studio audio: 9 - Peralatan studio video dan film : 19 - Alat studio lainnya : 1
11	Alat Komunikasi Telephone	2	Buah	
12	Peralatan pemancar/parabola	1	Buah	
13	Komputer unit	50	Buah	- PC Unit : 6 - Laptop : 42 - Personal komputer lainnya : 2
14	Peralatan Komputer/hard disk	2	Buah	
15	Peralatan personal komputer	39	Buah	- Printer : 34 - External Harddisk : 5
16	Peralatan jaringan	2	Buah	- Server : 1 - Modem : 1
17	Jaringan listrik	2	Buah	
18	Sumur resapan	1	buah	

Sumber Data : Dinpermades 2021

1.4 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan. Hal ini disebabkan analisis isu strategis merupakan salah satu dasar perumusan misi pembangunan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Belum semua masyarakat dan desa memiliki kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap manfaat aset milik negara, pengetahuan, teknologi, alat produksi, modal dan pasar serta akses terhadap sumber-sumber daya keuangan;
- b. Belum optimalnya perkembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi dan peran masyarakat desa dalam mengembangkan potensi dan nilai kearifan lokal dan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraannya;
- c. Keterlibatan masyarakat miskin dan rentan, kelompok perempuan, dan kelompok/forum anak dalam pembangunan desa yang masih perlu ditingkatkan.
- d. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang perlu menyesuaikan UU Desa.
- e. Pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan potensi desa.
- f. Kontribusi BUMDESA terhadap PADes.
- g. Keterbukaan informasi publik desa.

➤ INDEKS DESA MEMBANGUN

UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan keharusan menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dilaksanakan melalui perlindungan dan pemberdayaan desa, sehingga desa

menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Perlindungan dan pemberdayaan desa menjadi langkah utama sehingga desa (dan masyarakatnya) mampu mengelola, memanfaatkan serta mempertahankan jati diri dan kemajuan yang dicapainya. Langkah utama membutuhkan strategi dan program yang terencana untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi oleh desa.

Terhadap isu-isu strategis di atas, maka pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (sebagai dampak) melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk :

- a. Menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai perkembangan desa;
- b. Menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa;
- c. Menjadi instrumen koordinasi baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun dengan desa dan lembaga yang ada.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) status atau perkembangan desa ada 5 Klasifikasi Status Desa yaitu :

- a. Desa Mandiri

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada Yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan

ekologi secara berkelanjutan.

b. Desa Maju

Desa Maju atau bisa juga disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

c. Desa Berkembang

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

d. Desa Tertinggal

Desa Tertinggal atau bisa juga disebut dengan Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

e. Desa Sangat Tertinggal

Desa Sangat Tertinggal atau bisa juga disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

 Rata-rata Nilai IDM

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial,

dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan.

Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) antara lain :

- a. Ketahanan Sosial : Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Permukiman
- b. Ketahanan Ekologi : Kualitas lingkungan, Potensi rawan bencana, Tanggap bencana
- c. Ketahanan Ekonomi : Keberagaman produksi masyarakat desa, Tersedianya pusat pelayanan perdagangan, Akses distribusi/logistik, Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan wilayah.

Sedangkan untuk Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu :

STATUS DESA	RENTANG NILAI
MANDIRI	IDM > 0,8155
MAJU	0,7072 < IDM < 0,8155
BERKEMBANG	0,5989 < IDM < 0,7072
TERTINGGAL	0,4907 < IDM < 0,5989
SANGAT TERTINGGAL	IDM < 0,4907

Adapun Rata-rata nilai IDM di Kabupaten Rembang selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel I. 3 Indeks Desa Membangun Kab. Rembang Tahun 2016-2021

Indeks Desa Membangun	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	NA	0,605	0,636	0,634	0,67	0,68

Sumber data: Dinpermades 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IDM di Kabupaten Rembang sampai dengan Triwulan IV menunjukkan bahwa angka rata-rata 0,68% naik 0,01% dibanding Tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan 3 indeks komposit penilaian yaitu Sosial (IKS), Ekonomi (IKE), Lingkungan (IKL) di masing-masing desa.

Tabel I. 4 Rekap Status Perkembangan Kemandirian Desa Tahun 2021

No	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Sumber		4	14	-	-
2	Bulu		3	13	-	-
3	Gunem	1	15	-	-	-
4	Sale		2	13	-	-

No	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
5	Sarang			23	-	-
6	Sedan	1	7	13	-	-
7	Pamotan	1	1	21	-	-
8	Sulang		2	19	-	-
9	Kaliori	1	7	15	-	-
10	Rembang	3	18	6	-	-
11	Pancur		3	20	-	-
12	Kragan		7	20	-	-
13	Sluke			14	-	-
14	Lasem		6	14	-	-
	Jumlah	7	75	205		

Sumber data: Dinpermades 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari sejumlah 14 Kecamatan dan 287 desa di Kabupaten Rembang, terdapat 7 desa di 5 Kecamatan yang mempunyai desa dengan status Desa Mandiri, 75 desa di 12 Kecamatan dengan status Desa Maju dan status tertinggi dari 14 kecamatan di Kabupaten Rembang adalah Desa Berkembang yaitu sejumlah 205 desa dengan status Desa Berkembang.

Tabel I. 5 Perbandingan Status Perkembangan Kemandirian Desa Tahun 2020 dan 2021

No	Status	Tahun 2020	%	Tahun 2021	%	Keterangan
1	Mandiri	4	1.39%	7	2.44%	Naik
2	Maju	53	18.47%	75	26.13%	Naik
3	Berkembang	228	79.44%	205	71.43%	Turun
4	Tertinggal	2	0.70%	0	0.00%	Turun
5	Sangat Tertinggal	0	0.00%	0	0.00%	Turun
	Jumlah	287		287		

Sumber data: Dinpermades 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan dan penurunan status desa di tahun 2021. Status Desa Mandiri terjadi Kenaikan 1,05 % atau sejumlah 3 desa naik dari kriteria status Desa Maju menjadi Desa Mandiri. Status Desa Maju terjadi Kenaikan sebesar 7,66 % atau naik sejumlah 22 desa dari kriteria status Desa Berkembang menjadi Desa Maju. Sedangkan yang terjadi penurunan adalah Status Desa Berkembang, yang Turun sebesar 8,01 % atau 23 desa karena perubahan status menjadi Desa Maju. Untuk Status Desa Tertinggal juga terjadi penurunan karena perubahan status menjadi Desa Berkembang yaitu sebesar 0,70 % atau 2 desa telah naik menjadi status kriteria Desa Berkembang.

1.5 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang ini berdasarkan pada amanat Peraturan Perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021;
12. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perbup No. 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.6 Sistematika

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2021 terdiri dari 4 (empat) Bab, sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang, maksud dan tujuan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, gambaran singkat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja organisasi, kondisi pegawai, data sarana prasarana, pembiayaan, dan sistematika penyusunan.

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan tentang acuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang sebagaimana penjabaran dari RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, yang kemudian dari Renstra tersebut akan diturunkan dalam bentuk Renja sebagai dasar Rencana Kerja Tahunan (RKT). Capaian Kinerja dan Realisasi pelaksanaan dalam dokumen DPA dijabarkan dalam program dan kegiatan yang disyahkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berdasarkan pada tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja dan capaiannya.

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut ;

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta strategi penyelesaian
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

$$\text{Rumus efisiensi} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya} \times 100\%}{\text{Target Biaya}} \right]$$

$$\text{Rumus efektivitas} = \left[\frac{\text{Capaian Kinerja} \times 100\%}{\text{Target Kinerja}} \right]$$

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB. IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Rembang Tahun 2021 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten. RPJMD tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang yang ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahunan.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumberdaya Manusia, yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan”* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun indikator kinerja utama dan target yang hendak dicapai pada tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel II. 1 Indikator Kinerja Utama Dinpermades Tahun 2021

Tujuan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,68 %

Sedangkan indikator sasaran yang hendak dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel II. 2 Indikator Kinerja Sasaran Dinpermades Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemberdayaan berbasis masyarakat	% desa dengan kinerja baik	75%

Guna mencapai sasaran tersebut di atas dengan mempertimbangkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang telah menetapkan 5 program, 9 kegiatan, dan 40 sub kegiatan. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan program dan kegiatan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel II. 3 Program dan Kegiatan Dinpermades Tahun 2021

No	Program - Kegiatan	Outcome/Output	Target	Pagu Anggaran
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% ketercapaian pelayanan umum	95%	4.246.032.508
		% ketercukupan sarana prasarana aparatur	95%	
		% pemenuhan pelayanan kepegawaian	95%	
		% pemenuhan pelayanan keuangan	95%	
		% Keselarasan Perencanaan terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah	70%	

No	Program - Kegiatan	Outcome/Output	Target	Pagu Anggaran
		% Informasi yang disampaikan ke publik	95%	
1	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun, Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun, Jumlah Informasi yang disampaikan ke publik</i>	3 2 2	<i>16.511.593</i>
a	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 dok	1.276.593
b	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1 dok	4.540.000
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun, Jumlah Informasi yang disampaikan ke publik	2 dok 2 dok	10.695.000
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</i>	<i>Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik</i>	<i>3 dok</i>	<i>3.185.016.000</i>
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	1 dok	3.028.176.000
b	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	2 dok	156.840.000
3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</i>	<i>Jumlah dokumen manajemen yang dikelola dengan baik</i>	<i>4 dok</i>	<i>20.600.000</i>
a	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah dokumen manajemen yang dikelola dengan baik dalam pelayanan kepegawaian	4 dok	20.600.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	160.836.355
a	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan penerangan tempat kerja	100 %	3.000.000
b	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	% Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan sarana kerja aparatur	100 %	21.379.000

No	Program - Kegiatan	Outcome/Output	Target	Pagu Anggaran
c	Penyediaan peralatan rumah tangga	% Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor	100 %	3.585.155
d	Penyediaan bahan logistik kantor	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan logistik kantor	100 %	27.751.000
e	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.000.000
f	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.600.000
g	Penyediaan bahan/material	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4.192.200
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan pelaksanaan perjalanan dinas aparatur	100 %	94.329.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	604.450.000
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1.020.000
b	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	54.596.000
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	14.700.000
d	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	534.134.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang Daerah yang dikelola dengan baik	2 dok	258.618.560.000
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan barang Daerah yang dikelola dengan baik	1 dok	58.618.560
b	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah dokumen pengelolaan barang milih Daerah yang dikelola dengan baik	1 dok	200.000.000
B	Program Penataan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang memberikan pelayanan publik	100%	35.250.000

No	Program - Kegiatan	Outcome/Output	Target	Pagu Anggaran
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang memberikan pelayanan publik sesuai standart	258 desa	35.250.000
a	Fasilitasi penataan kewenangan desa	Jumlah Pemerintah Desa yang memberikan pelayanan publik sesuai standart	30 desa	35.250.000
C	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kawasan perdesaan yang terbentuk (Jumlah kawasan terbentuk: Jumlah Desa) x 100 % Persentase desa yang telah melakukan kerjasama	16 % 85%	1.938.080.278
1	Fasilitasi Kerjasama antar desa	Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang	2 kawasan	1.938.080.278
a	Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	Jumlah MOU/perjanjian kerjasama yang difasilitasi	4 MOU	34.721.350
b	Fasilitasi kerjasama antar desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/kota	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa/kecamatan/kabupaten	4 desa	1.535.860.475
c	Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang	2 kawasan	367.498.453
D	Program Administrasi Pemerintahan desa	Persentase desa yang mengalokasikan anggarannya untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan (PRONANGKIS) Persentase desa dengan pengelolaan APBDes secara akuntabel	80% 95%	634.215.000
1	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah anggaran desa yang mendukung penanggulangan kemiskinan (Pronangkis)	Rp. 19.229.000.000	634.215.000
a	Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi antara dinas, kecamatan, TPP dan instansi lintas sektoral	20 keg	31.465.000
b	Fasilitasi penyusunan Produk hukum Desa	Jumlah peserta pelatihan penyusunan produk hukum desa	80 org	8.050.000
c	Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah peserta pelatihan perencanaan pembangunan partisipatif	80 org	15.023.000

No	Program - Kegiatan	Outcome/Output	Target	Pagu Anggaran
d	Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa	Jumlah peserta pelatihan dan monitoring pengelolaan keuangan desa	287 org	68.510.000
e	Pembinaan peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah peserta yang dikirim mengikuti pelatihan/bimtek	60 org	7.856.000
f	Evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Jumlah anggaran evaluasi dan pengawasan peraturan desa yang mendukung penanggulangan kemiskinan (Pronangkis)	574 peraturan desa	392.334.000
g	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa	Jumlah pelaksanaan fasilitas pengisian perangkat desa	60 org	10.210.000
h	Fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	Jumlah pelaksanaan pilkades antar waktu	10	89.092.000
i	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan desa serta lomba desa dan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan evaluasi perkembangan desa	1 keg	11.675.000
E	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga desa aktif	90%	881.739.214
1	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lembaga ekonomi desa aktif - Jumlah Bumdesa yang bermitra dengan industri rumahan - Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif - Jumlah TTG yang dimanfaatkan industri rumahan keluarga miskin 	138 lbg 24 lbg 5650 lbg 1 bh	881.739.214
a	Peningkatan Kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga sosial budaya aktif	5358 lbg	82.739.214
b	Fasilitasi Pengembangan usaha Ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah lembaga ekonomi sosial budaya desa aktif dalam mendukung bulan bakti gotong royong masyarakat	5 lbg	63.000.000

No	Program - Kegiatan	Outcome/Output	Target	Pagu Anggaran
c	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah TTG yang dimanfaatkan industri rumahan keluarga miskin	1 bh	54.640.000
d	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah lembaga sosial budaya dalam mendukung bulan bakti gotong royong masyarakat	5 lbq	31.360.000
e	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif	287 desa	650.000.000

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk mewujudkan Renstra tersebut tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Adapun Visi dan Misi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021, yaitu sebagai berikut :

2.1.1 Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Rembang, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021, yang juga menjadi visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang, adalah

sebagai berikut : *“Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumberdaya Manusia, yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan.”*

2.1.2 Misi

Misi adalah suatu tindakan yang harus dilaksanakan, sebagai suatu upaya untuk dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.
- 2) Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.
- 3) Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 4) Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.
- 6) Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.
- 7) Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

Dari misi tersebut di atas, yang terkait langsung dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang adalah misi

ke – 1, yaitu

Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.

2.1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dan telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 adalah : *“Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan kemandirian desa.*

Dengan indikator tujuan : Indeks Desa Membangun (IDM).

2.1.4 Sasaran

Sasaran yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dalam mencapai tujuan adalah :

“Meningkatnya Pemberdayaan berbasis masyarakat” Dengan indikator sasaran : % desa dengan kinerja baik.

2.1.5 Strategi

Strategi yang ditempuh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam periode tahun 2016 – 2021 ini guna mencapai visi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, antara lain :

- 1) Meningkatkan kualitas kelembagaan desa melalui sosialisasi, workshop, pelatihan perencanaan;
- 2) Peningkatan akses pelayanan dasar masyarakat;
- 3) Pembentukan kawasan dan peningkatan kerjasama desa;
- 4) Peningkatan kebersamaan, gotong royong dan sosial budaya masyarakat sebagai perwujudan nilai-nilai luhur dalam keberdayaan masyarakat melalui komunikasi, Informasi, Edukasi(KIE) dan fasilitasi pergerakan kebersamaan, kegotong royongan dan swadaya masyarakat.

2.1.6 Kebijakan

Kebijakan merupakan arah yang diambil untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan menjadi sebuah ketentuan yang telah disepakati untuk dijadikan pedoman, pegangan, dan petunjuk bagi setiap aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang. Kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 antara lain sebagai berikut :

- 1) Peningkatan fungsi dan peran lembaga desa dalam pembangunan di berbagai aspek;
- 2) Meningkatkan pemerataan akses pelayanan sosial dasar masyarakat melalui bantuan keuangan;
- 3) Peningkatan pemerataan akses pelayanan sosial dasar masyarakat melalui fasilitasi dan sosialisasi pembangunan gedung posyandu;
- 4) Peningkatan kerjasama pengembangan kawasan pada pengelolaan potensi desa.

Tabel II. 4 Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Dinpermades Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
A	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan kemandirian desa		Indeks desa Membangun (IDM)	0,634	0,67	0,68	0,70	0,71
		Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	% desa dengan kinerja baik	100,00	70	75	-	-
			Persentase Kawasan Perdesaan yang terbentuk (Jumlah kawasan terbentuk : Jumlah Desa) X 100%	8	9,75	16	-	-
			Persentase Desa yang telah melakukan Kerjasama	128	75	85	-	-
			Persentase Desa Yang Mengalokasikan Anggarannya Untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS)	100	70	80	-	-
			Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa secara akuntabel	100	90	95	-	-

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
			Persentase Pemerintah Desa Yang Memberikan Pelayanan Publik	100	100	100	-	-
			Persentase Lembaga Desa aktif	98	85	90	100	100

2.2 Perencanaan Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan dengan tujuan, sasaran, indikator dan target yang akan dicapai sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel II. 5 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinpermades Tahun 2021

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Tujuan : Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan kemandirian desa	Indikator Kinerja Utama : Indeks desa Membangun (IDM)	0,68
Sasaran Strategis : Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	Indikator kinerja sasaran : % desa dengan kinerja baik	75

Tabel II. 6 Rencana Kinerja Dinpermades Tahun 2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan kemandirian desa		Indeks desa Membangun (IDM)	%	0,68
Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat		% desa dengan kinerja baik	%	75	
		Persentase Kawasan Perdesaan yang terbentuk (Jumlah kawasan terbentuk : Jumlah Desa) X 100%	%	16	
		Persentase Desa yang telah melakukan Kerjasama	%	85	
		Persentase Desa Yang Mengalokasikan Anggarannya Untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS)	%	80	
		Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa secara akuntabel	%	95	

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
			Persentase Pemerintah Desa Yang Memberikan Pelayanan Publik	%	100
			Persentase Lembaga Desa aktif	%	90

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang *seharusnya* tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2021 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2016- 2021. Adapun rincian perjanjian kinerja Dinpermades Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja Dinpermades Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	Indeks desa Membangun (IDM)	%	0,68

Tabel II. 8 Target Kinerja Program dan Kegiatan Dinpermades Tahun 2021

No	Program - Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% ketercapaian pelayanan umum	95%	4.246.032.508
		% ketercukupan sarana prasarana aparatur	95%	
		% pemenuhan pelayanan kepegawaian	95%	
		% pemenuhan pelayanan keuangan	95%	
		% Keselarasan Perencanaan terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah	70%	
		% Informasi yang disampaikan ke publik	95%	

No	Program - Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
1	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun, Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun, Jumlah Informasi yang disampaikan ke publik</i>	3 2 2	16.511.593
a	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 dok	1.276.593
b	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1 dok	4.540.000
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun, Jumlah Informasi yang disampaikan ke publik	2 dok 2 dok	10.695.000
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</i>	<i>Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik</i>	3 dok	3.185.016.000
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	1 dok	3.028.176.000
b	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	2 dok	156.840.000
3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</i>	<i>Jumlah dokumen manajemen yang dikelola dengan baik</i>	4 dok	20.600.000
a	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah dokumen manajemen yang dikelola dengan baik dalam pelayanan kepegawaian	4 dok	20.600.000
4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>	100 %	160.836.355
a	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan penerangan tempat kerja	100 %	3.000.000
b	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	% Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan sarana kerja aparatur	100 %	21.379.000
c	Penyediaan peralatan rumah tangga	% Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor	100 %	3.585.155

No	Program - Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
d	Penyediaan bahan logistik kantor	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan logistik kantor	100 %	27.751.000
e	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.000.000
f	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.600.000
g	Penyediaan bahan/material	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4.192.200
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan pelaksanaan perjalanan dinas aparatur	100 %	94.329.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	604.450.000
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1.020.000
b	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	54.596.000
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	14.700.000
d	Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	534.134.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang Daerah yang dikelola dengan baik	2 dok	258.618.560.000
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan barang Daerah yang dikelola dengan baik	1 dok	58.618.560
b	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah dokumen pengelolaan barang milih Daerah yang dikelola dengan baik	1 dok	200.000.000
B	Program Penataan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang memberikan pelayanan publik	100%	35.250.000

No	Program - Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Pemerintah Desa yang memberikan pelayanan publik sesuai standart	258 desa	35.250.000
a	Fasilitasi penataan kewenangan desa	Jumlah Pemerintah Desa yang memberikan pelayanan publik sesuai standart	30 desa	35.250.000
C	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kawasan perdesaan yang terbentuk (Jumlah kawasan terbentuk: Jumlah Desa) x 100 % Persentase desa yang telah melakukan kerjasama	16 % 85%	1.938.080.278
1	Fasilitasi Kerjasama antar desa	Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang	2 kawasan	1.938.080.278
a	Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	Jumlah MOU/perjanjian kerjasama yang difasilitasi	4 MOU	34.721.350
b	Fasilitasi kerjasama antar desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/kota	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasama antar desa/kecamatan/kabupaten	4 desa	1.535.860.475
c	Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang	2 kawasan	367.498.453
D	Program Administrasi Pemerintahan desa	Persentase desa yang mengalokasikan anggarannya untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan (PRONANGKIS) Persentase desa dengan pengelolaan APBDes secara akuntabel	80% 95%	634.215.000
1	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah anggaran desa yang mendukung penanggulangan kemiskinan (Pronangkis)	Rp. 19.229.000.000	634.215.000
a	Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi antara dinas, kecamatan, TPP dan instansi lintas sektoral	20 keg	31.465.000
b	Fasilitasi penyusunan Produk hukum Desa	Jumlah peserta pelatihan penyusunan produk hukum desa	80 org	8.050.000
c	Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah peserta pelatihan perencanaan pembangunan partisipatif	80 org	15.023.000

No	Program - Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
d	Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa	Jumlah peserta pelatihan dan monitoring pengelolaan keuangan desa	287 org	68.510.000
e	Pembinaan peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah peserta yang dikirim mengikuti pelatihan/bimtek	60 org	7.856.000
f	Evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Jumlah anggaran evaluasi dan pengawasan peraturan desa yang mendukung penanggulangan kemiskinan (Pronangkis)	574 peraturan desa	392.334.000
g	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa	Jumlah pelaksanaan fasilitas pengisian perangkat desa	60 org	10.210.000
h	Fasilitasi Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	Jumlah pelaksanaan pilkades antar waktu	10	89.092.000
i	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan desa serta lomba desa dan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan evaluasi perkembangan desa	1 keg	11.675.000
E	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga desa aktif	90%	881.739.214
1	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lembaga ekonomi desa aktif - Jumlah Bumdesa yang bermitra dengan industri rumahan - Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif - Jumlah TTG yang dimanfaatkan industri rumahan keluarga miskin 	138 lembaga 24 lembaga 5650 lembaga 1 bh	881.739.214
a	Peningkatan Kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga sosial budaya aktif	5650 lembaga	82.739.214

No	Program - Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
b	Fasilitasi Pengembangan usaha Ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah Bumdesa yang bermitra dengan industri rumahan	24 lembaga	63.000.000
		Jumlah lembaga ekonomi desa aktif	138 lembaga	
c	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah TTG yang dimanfaatkan industri rumahan keluarga miskin	1 bh	54.640.000
d	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah lembaga sosial budaya dalam mendukung bulan bakti gotong royong masyarakat	5 lembaga	31.360.000
e	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif	287 desa	650.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja SKPD. Pengukuran Kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel III. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	>100%	Sangat baik
2	85,00 % - 100%	Baik
3	65% - 84,99%	Cukup
4	50% - 64,99%	kurang
5	< 50,00 %	Sangat Kurang

Hingga akhir tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran kinerja dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya, yaitu :

1. Tujuannya yaitu : Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan kemandirian desa.
2. Sasaran strategis yaitu : Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dan ditegaskan pula dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 pada saat penyusunan LKJIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2021. Adapun capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2021		CAPAIAN			RENSTRA	
			TARGET	REALISASI	2021	2020	2019	TARGET	%CAPAIAN (%) s/d 2021
1	2	3	4	5	6	7		8	9
Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan kemandirian desa		Indeks desa Membangun (IDM)	0,68%	0,68%	0,68%	0,67%	0,63%	0,68%	0,68%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2021		CAPAIAN			RENSTRA	
			TARGET	REALISASI	2021	2020	2019	TARGET	%CAPAIAN (%) s/d 2021
1	2	3	4	5	6	7		8	9
	Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	% desa dengan kinerja baik	75%	75%	75%	100%	na	75%	100%
		Persentase Kawasan Perdesaan yang terbentuk (Jumlah kawasan terbentuk : Jumlah Desa) X 100%	16	16	16	8,00	8	16	100
		Persentase Desa yang telah melakukan Kerjasama	85	100	100	100	128	85	117,65
		Persentase Desa Yang Mengalokasikan Anggarannya Untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS)	80	100	100	100	100	80	125
		Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa secara akuntabel	95	99,30	99,30	100	100	95	104,53
		Persentase Pemerintah Desa Yang Memberikan Pelayanan Publik	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Lembaga Desa aktif	90	100	100	100	98	90	111,11

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2021 atas 6 (enam) indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang telah memenuhi target atas indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dan status atas capaian RPJMD sampai dengan akhir tahun 2021 adalah **Sangat Baik** dengan nilai rata-rata OPD sebesar 109,71 %.

Indeks desa Membangun (IDM)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IDM di Kabupaten Rembang sampai dengan akhir Renstra Tahun 2021 menunjukkan bahwa angka rata-rata 0,68% naik 0,01% dibanding Tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan 3 indeks komposit penilaian yaitu Sosial (IKS), Ekonomi (IKE), Lingkungan (IKL) di masing-masing desa.

% desa dengan kinerja baik

Sejumlah 215 desa dari 287 desa sudah melaksanakan kinerja yang baik, yang diukur dari penyerapan anggaran desa yang tinggi dengan rata-rata penyerapan anggaran di desa sebesar 96%. Sedangkan untuk 72 desa lainnya akan dilakukan pembinaan secara khusus agar kedepannya seluruh desa bisa melaksanakan kinerja dengan baik.

Persentase Kawasan Perdesaan yang terbentuk:

Realisasi tahun 2021 telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 16 %. Dasar Penghitungan ini menggunakan formulasi :

$$\left\{ \frac{\text{Jumlah kawasan terbentuk}}{\text{Jumlah desa keseluruhan}} \times 100 \% \right\} = \frac{46 \text{ desa}}{287 \text{ desa}} \times 100 \%$$

Tabel III. 3 Data Kawasan Perdesaan yang Terbentuk Tahun 2021

No	Nama Kawasan	Desa	kecamatan
A	KAWASAN JOGLO SEMAR IJO KEC. BULU DAN SUMBER		
1		Sendangmulyo	Bulu
2		Pondokrejo	Bulu
3		Mlatirejo	Bulu
4		Logede	Sumber
5		Pelemsari	Sumber
B	KAWASAN PESISIR KRAGAN LIAT TEMPAYAN		
1		Balongmulyo	Kragan
2		Plawangan	Kragan
3		Tegalmulyo	Kragan
C	KAWASAN GUNUNG KRAGAN TERSANJUNG RO WATU		
1		Tanjungsari	Kragan
2		Watupecah	Kragan
3		Terjan	Kragan
4		Sendang	Kragan
5		Woro	Kragan
D	KAWASAN EK BERDIKARI BINA TANI SEJAHTERA		
1		Kalipang	Sarang
2		Gonggang	Sarang
3		Dadapmulyo	Sarang
4		Sumbermulyo	Sarang
5		Nglojo	Sarang
6		Gunungmulyo	Sarang

E	KAWASAN PENGHASIL GARAM MUTIARA PESISIR KALIORI		
1		Tambakagung	Kaliori
2		Tunggulsari	Kaliori
3		Tasikharjo	Kaliori
4		Mojowarno	Kaliori
5		Dresi Kulon	Kaliori
6		Dresi Wetan	Kaliori
7		Purworejo	Kaliori
8		Karangsekar	Kaliori
9		Bogoharjo	Kaliori
10		banyudono	Kaliori
11		Pantiharjo	Kaliori

Sumber Data : Dinpermades 2021

Persentase Desa yang telah melakukan Kerjasama:

Realisasi tahun 2021 telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 85% Dasar Penghitungan ini menggunakan formulasi :

$$\left\{ \frac{\text{Jumlah desa yang telah melakukan kerjasama}}{\text{Jumlah desa keseluruhan}} \times 100 \% \right\} = \frac{287 \text{ desa}}{287 \text{ desa}} \times 100 \%$$

Dan status atas capaian RPJMD selama lima tahun sampai dengan akhir tahun 2021 adalah **Sangat baik** dengan nilai capaian sebesar 117,65 %.

Persentase Desa Yang Mengalokasikan Anggarannya Untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS)

Sebanyak 287 desa di Tahun 2021 telah mengalokasikan anggarannya untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan (PRONANGKIS). Dan Realisasi tahun 2021 telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Target anggaran

untuk mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS) Sebesar Rp. 19.229.000.000,00 sedangkan realisasi mencapai Rp. 146.710.453.275,00. Sehingga status atas capaian RPJMD selama lima tahun sampai dengan akhir tahun 2021 adalah **Sangat baik** dengan nilai capaian sebesar 125 %. Salah satu Faktor yang mempengaruhi tingginya capaian realisasi adalah karena anggaran Dana Desa di prioritaskan untuk BLT Dana Desa.

Persentase desa dengan pengelolaan APBDesa secara akuntabel

Sebanyak 285 desa dari 287 desa di Kabupaten Rembang telah melakukan pengelolaan APBDes secara akuntabel, yang diukur dari penyampaian pertanggungjawaban APBDes yang tepat waktu. Dan Realisasi tahun 2021 telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 99,30% dari target yang ditetapkan sebesar 95%.

Penghitungan ini menggunakan formulasi :

$$\left\{ \frac{\text{desa dengan penyampaian pertanggungjawaban APBDes tepat waktu}}{\text{Jumlah desa keseluruhan}} \times 100 \% \right\}$$

Dan status atas capaian RPJMD selama lima tahun sampai dengan akhir tahun 2021 adalah **Sangat Baik** dengan nilai capaian sebesar 104,53 %.

Persentase Pemerintah Desa Yang Memberikan Pelayanan Publik

Realisasi tahun 2021 telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100 %. Sebanyak 287 desa di Kabupaten Rembang telah memberikan pelayanan publik sesuai standart.

Dan status atas capaian RPJMD selama lima tahun sampai dengan akhir tahun 2021 adalah **Baik** dengan nilai capaian sebesar 100 %.

Persentase Lembaga Desa aktif

Realisasi tahun 2021 telah melampaui dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100 % dari 90 %. Ada 6 lembaga desa yang aktif di Kabupaten Rembang, yaitu :

- a. RT
- b. RW
- c. Posyandu
- d. LPMD
- e. PKK
- f. BPSPAMS

Keaktifan dari 6 lembaga desa selama kurun waktu 5 tahun ini bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel III. 4 Rekapitulasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2017 - 2021

No	Nama Lembaga	Jumlah Lembaga									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Aktif	Tidak	Aktif	Tidak	Aktif	Tidak	Aktif	Tidak	Aktif	Tidak
1	RW	971	-	971	-	971	-	971	-	971	-
2	RT	3264	-	3264	-	3264	-	3264	-	3264	-
3	PKK	287	-	287	-	287	-	287	-	294	-
4	Posyandu	1228	-	1233	-	1232	-	1230	-	1230	-
5	LPMD	287	-	287	-	287	-	287	-	287	-
6	BPSPAMS	12	-	14	1	16	-	9	-	152	-
	Jumlah	6049	-	6056	1	6057	-	6048	-	6198	-

Sumber data : Dinpermades 2021

Sehingga penghitungan berasal dari formulasi:

$$\left\{ \frac{\text{Jumlah lembaga desa aktif}}{\text{Jumlah keseluruhan lembaga desa}} \right\} \times 100 \% = \frac{6198}{6198} \times 100\%$$

Dan status atas capaian RPJMD selama lima tahun sampai dengan akhir tahun 2021 adalah **Sangat Baik** dengan nilai capaian sebesar 111,11 %.

Tabel III. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinpermades Berdasarkan Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	
I	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum	95%	95%	100%
		Persentase ketercukupan sarana prasarana aparatur	95%	95%	100%
		Persentase pemenuhan pelayanan kepegawaian	95%	95%	100%
		Persentase pemenuhan pelayanan keuangan	95%	95%	100%
		Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah	70%	70%	100%
		Persentase Informasi yang disampaikan ke publik	95%	95%	100%
1	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3 dok	3 dok	100%
		Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	2 dos	2 dos	100%
		Jumlah Informasi yang disampaikan ke publik	2 informasi	2 informasi	100%
2	Administrasi keuangan Perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	3 dok	3 dok	100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah dokumen manajemen yang dikelola dengan baik	4 dok	4 dok	100%
4	Administrasi Umum Perangkat daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%

NO	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
	5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	2 dok	2 dok	100%
II	Program penataan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang memberikan Pelayanan Publik	100%	100%	100%
	1 Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah pemerintah desa yang memberikan pelayanan publik sesuai standart	258 desa	258 desa	100%
III	Program Kerjasama Antar Desa	Persentase Kawasan perdesaan yang terbentuk (Jumlah kawasan terbentuk: Jumlah desa)x 100%	16%	16%	100%
		Persentase desa yang telah melakukan kerjasama	85%	85%	100%
	1 Fasilitasi Kerjasama antar desa	Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang	2 kawasan	5 kawasan	250%
IV	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mengalokasikan anggarannya untuk mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS)	80%	100%	125%
		Persentase desa dengan pengelolaan APBDesa secara akuntabel	95%	99,30%	104,5%
	1 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah anggaran desa yang mendukung penanggulangan kemiskinan (Pronangkis)	19.229.000.000	146.710.453.275	125%
V	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga desa aktif	90%	100%	100%

NO	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
	1. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/Kota	Jumlah lembaga ekonomi desa aktif	138 lembaga	175 lembaga	126%
		Jumlah Bumdesa yang bermitra dengan industri rumaha	24 lembaga	24 lembaga	100%
		Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif	5650 lembaga	6198 lembaga	109%
		Jumlah TTG yang dimanfaatkan industri rumahan keluarga miskin	1 bh	1 bh	100%

Dari tabel diatas, untuk pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 5 program dengan 12 indikator kinerja dan 10 kegiatan dengan 15 indikator kinerja.

Dari 12 indikator kinerja program dan 15 indikator kinerja kegiatan, semua indikator mencapai target, dengan tingkat capaian realisasi target Renstra rata-rata mencapai 100% .

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka untuk setiap pernyataan kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Tabel III. 6 Target dan Realisasi Kinerja Dinpermades Tahun 2021

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber data
A	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan kemandirian desa	Indeks desa Membangun (IDM)	0,68%	0,68%	100%	Baik	Dinpermades
1	Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	% desa dengan kinerja baik	75%	75%	100%	Baik	Dinpermades
a		Persentase Kawasan Perdesaan yang terbentuk (Jumlah kawasan terbentuk : Jumlah Desa) X 100%	16	16	100%	Baik	Dinpermades
b		Persentase Desa yang telah melakukan Kerjasama	85	100	117,6%	Sangat baik	Dinpermades
c		Persentase Desa Yang Mengalokasikan Anggarannya Untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS)	80	100	125%	Sangat baik	Dinpermades
d		Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa secara akuntabel	95	99,30	104,5%	Sangat baik	Dinpermades
e		Persentase Pemerintah Desa Yang Memberikan Pelayanan Publik	100	100	100%	Baik	Dinpermades
f		Persentase Lembaga Desa aktif	90	100	111,1%	Sangat baik	Dinpermades

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 8 indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang, 4 indikator kinerja Utama dapat tercapai **100%** atau kategori “**Baik**”, dan 4 indikator kinerja utama tercapai diatas 100% atau kategori “**Sangat Baik**”

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun)

Tabel III. 7 Target dan Realisasi Kinerja Dinpermades Kab. Rembang Tahun 2021 dan Beberapa Tahun Terakhir

NO.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
A	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan kemandirian desa	Indeks desa Membangun (IDM)	0,63 %	0,63%	100%	0,67%	0,67%	100%	0,68%	0,68 %	100%
1	Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	% desa dengan kinerja baik	Na	Na	Na	70%	100%	142,85%	75%	75%	100%
a		Persentase Kawasan Perdesaan yang terbentuk (Jumlah kawasan terbentuk : Jumlah Desa) X 100%	Na	Na	Na	Na	Na	Na	16%	16%	100%
b		Persentase Desa yang telah melakukan Kerjasama	Na	Na	Na	Na	Na	Na	85%	100%	117,65%

NO.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
c		Persentase Desa Yang Mengalokasikan Anggarannya Untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS)	Na	Na	Na	Na	Na	Na	80%	100%	125%
d		Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa secara akuntabel	Na	Na	Na	Na	Na	Na	95%	99,30%	104,53%
e		Persentase Pemerintah Desa Yang Memberikan Pelayanan Publik	Na	Na	Na	Na	Na	Na	100%	100%	100%
f		Persentase Lembaga Desa aktif	Na	Na	Na	Na	Na	Na	90%	100%	111,11 %

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel III. 8 Realisasi Capaian Kinerja Dinpermades Kab. Rembang Tahun 2021

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target 2023	Tingkat Kemajuan
A	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan kemandirian desa	Indeks desa Membangun (IDM)	0,68%	0,71	0,03%
1	Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	% desa dengan kinerja baik	100%	-	-
a		Persentase Kawasan Perdesaan yang terbentuk (Jumlah kawasan terbentuk : Jumlah Desa) X 100%	100%	-	-
b		Persentase Desa yang telah melakukan Kerjasama	117,65%	-	-
c		Persentase Desa Yang Mengalokasikan Anggarannya Untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS)	125%	-	-
d		Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa secara akuntabel	104,53%	-	-
e		Persentase Pemerintah Desa Yang Memberikan Pelayanan Publik	100%	-	-
f		Persentase Lembaga Desa aktif	111,11%	100%	-11,11%

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel III. 9 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Dinpermades Tahun 2021

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan kemandirian desa	Indeks desa Membangun (IDM)	0,68%	0,68 %	100%	naik 0,01% dibanding Tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan 3 indeks komposit penilaian yaitu Sosial (IKS), Ekonomi (IKE), Lingkungan (IKL) di masing-masing desa.	-
	Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	% desa dengan kinerja baik	75%	75%	100%	Sejumlah 215 desa dari 287 desa sudah melaksanakan kinerja yang baik, yang diukur dari penyerapan anggaran desa yang tinggi dengan rata-rata penyerapan anggaran di desa sebesar 96%.	72 desa lainnya akan dilakukan pembinaan secara khusus
		Persentase Kawasan Perdesaan yang terbentuk (Jumlah kawasan terbentuk : Jumlah Desa) X 100%	16%	16%	100%	46 desa dari 9 Kawasan dibagi jumlah desa keseluruhan	
		Persentase Desa yang telah melakukan Kerjasama	85%	100%	117,65%	287 desa yang melakukan kerjasama dibagi jumlah keseluruhan desa (287) yang merupakan target selama 5 tahun	

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
		Persentase Desa Yang Mengalokasikan Anggarannya Untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS)	80%	100%	125%	Target anggaran untuk mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS) Sebesar Rp. 19.229.000.000,00 sedangkan realisasi mencapai Rp. 146.710.453.275,00	anggaran Dana Desa di prioritaskan untuk BLT Dana Desa
		Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa secara akuntabel	95%	99,30%	104,53%	Sebanyak 285 desa dari 287 desa di Kabupaten Rembang telah melakukan pengelolaan APBDes secara akuntabel, yang diukur dari penyampaian pertanggungjawaban APBDes yang tepat waktu	
		Persentase Pemerintah Desa Yang Memberikan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	Sebanyak 287 desa di Kabupaten Rembang telah memberikan pelayanan publik sesuai standart	
		Persentase Lembaga Desa aktif	90%	100%	111,11%	Jumlah lembaga desa aktif (6198) dibag jumlah keseluruhan lembaga desa (6198)x 100%	-

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III. 10 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	
I	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan kemandirian desa	0,68%	0,68%	100	-	-	-	-
A	Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	75%	75%	100%	-	-	-	-
	1. Persentase Kawasan Perdesaan yang terbentuk (Jumlah kawasan terbentuk : Jumlah Desa) X 100%	16%	16%	100%	1.938.080.278	1.928.037.003	99	1 %
	2. Persentase Desa yang telah melakukan Kerjasama	85%	100%	117,65%				
	3. Persentase Desa Yang Mengalokasikan Anggarannya Untuk Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS)	80%	100%	125%	634.215.000	622.686.410	98,18	1,82%
	4. Persentase desa dengan pengelolaan APB Desa secara akuntabel	95%	99,30%	104,53%				
	5. Persentase Pemerintah Desa Yang Memberikan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	35.250.000	35.143.900	99,67	0,33%
	6. Persentase Lembaga Desa aktif	90%	100%	111,11%	881.739.214	871.373.968	99	1%

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel III. 11 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja Dinpermades Tahun 2021

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan kemandirian desa	Indeks desa Membangun (IDM)	100				Menunjang
	Meningkatnya pemberdayaan berbasis masyarakat	% desa dengan kinerja baik	100				Menunjang
				I. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum	100%	Menunjang
			Persentase kecukupan sarana prasarana aparatur		100%	Menunjang	
			Persentase pemenuhan pelayanan kepegawaian		100%	Menunjang	
			Persentase pemenuhan pelayanan keuangan		100%	Menunjang	
			Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah		100%	Menunjang	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
					Persentase Informasi yang disampaikan ke publik	100%	Menunjang
				1. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	100%	Menunjang
					Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	100%	Menunjang
					Jumlah Informasi yang disampaikan ke publik	100%	Menunjang
				2. Administrasi keuangan Perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Menunjang
				3. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah dokumen manajemen yang dikelola dengan baik	100%	Menunjang
				4. Administrasi Umum Perangkat daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Menunjang
				5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Menunjang
				6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	100%	Menunjang
				II. Program penataan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang memberikan Pelayanan Publik	100%	Menunjang
				1. Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah pemerintah desa yang memberikan pelayanan publik sesuai standart	100%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
				III. Program Kerjasama Antar Desa	Persentase Kawasan perdesaan yang terbentuk (Jumlah kawasan terbentuk: Jumlah desa)x 100%	100%	Menunjang
					Persentase desa yang telah melakukan kerjasama	100%	Menunjang
				1. Fasilitasi Kerjasama antar desa	Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang	250%	Menunjang
				IV. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mengalokasikan anggarannya untuk mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan (PRONANGKIS)	100%	Menunjang
					Persentase desa dengan pengelolaan APBDesa secara akuntabel	104%	Menunjang
				1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah anggaran desa yang mendukung penanggulangan kemiskinan (Pronangkis)	125%	Menunjang
				V. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga desa aktif	100%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
				1. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/Kota	Jumlah lembaga ekonomi desa aktif	126%	Menunjang
					Jumlah Bumdesa yang bermitra dengan industri rumahan	100%	Menunjang
					Jumlah lembaga sosial budaya desa aktif	109%	Menunjang
					Jumlah TTG yang dimanfaatkan industri rumahan keluarga miskin	100%	Menunjang

Sumber Data : Dinpermades 2021

Dari tabel diatas, untuk pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 5 program dengan 12 indikator kinerja dan 10 kegiatan dengan 15 indikator kinerja.

Dari 12 indikator kinerja program dan 15 indikator kinerja kegiatan, semua indikator mencapai target, dengan tingkat capaian realisasi target Renstra rata-rata mencapai 100%

3.3 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang memiliki anggaran kegiatan sebesar Rp. 7.735.317.000,- (*Tujuh Milyar Tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah*) terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.994.326.000,-
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 3.740.991.000,-

dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 7.500.245.266,- (*Tujuh Milyar lima ratus juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*) atau 96,96%. Adapun untuk capaian anggaran per program dan kegiatan Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 12 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinpermades Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.111.342.508,00	4.045.823.985,00	98,40
1	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.511.593,00	16.307.900,00	98,77
2	Administrasi keuangan Perangkat daerah	3.194.326.000,00	2.999.301.597,00	93,89
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	20.600.000,00	20.600.000,00	100
4	Administrasi Umum Perangkat daerah	160.836.355,00	160.570.437,00	99,83
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	604.450.000,00	590.596.994,00	97,71
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	258.618.560,00	258.447.057,00	99,93
II	Program penataan Desa	35.250.000,00	35.143.900,00	99,70
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	35.250.000,00	35.143.000,00	99,70

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
III	Program Kerjasama Antar Desa	1.938.080.278	1.928.037.003	99
1	Fasilitasi Kerjasama antar desa	1.938.080.278	1.928.037.003	99
IV	Program Administrasi Pemerintahan Desa	634.215.000	622.686.410	98
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	634.215.000	622.686.410	98
V	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	881.739.214	871.373.214	99
1	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/Kota	881.739.214	871.373.214	99

Sumber Data : Laporan Keuangan Dinpermades 2021

Anggaran Dinpermades Tahun 2021 terdiri dari 5 Program, dan 10 kegiatan dan secara keseluruhan capaian anggaran program dan kegiatan Dinpermades mencapai rata-rata 98,4 %.

BAB IV P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Dinpermades Kabupaten Rembang merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinpermades Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **"SANGAT BAIK "** yaitu dengan nilai rata-rata **109,71%**,

4.2 REKOMENDASI


Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinpermades Kabupaten Rembang di masa mendatang antara lain :

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Dinpermades Kabupaten Rembang sehingga dapat lebih efektif dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan pemberdayaan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat desa.
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi yang ada.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REMBANG




Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670520 199303 1 010